



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gedung B Lantai III Telepon : (022) 6642865
Fax (022) 6642865 Website: www.cimahikota.go.id, e-mail: bappeda@cimahikota.go.id
Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 800 /kep.512/BAPPELITBANGDA/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan revisi Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, perlu revisi terhadap Standar Operasional Prosedur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

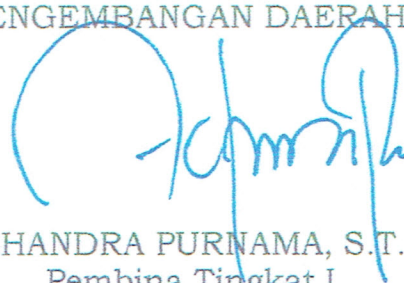
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
15. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
16. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
17. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI;
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi dengan daftar, uraian, dan alur aktivitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi;
- KETIGA : Mencabut Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Nomor 065/Kep.372/Bappelitbangda/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi,
pada tanggal, 22 November 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,



ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730413 199803 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 DAERAH KOTA CIMAHI
 NOMOR : 800/Kep.512/BAPPELITBANGDA/2022
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

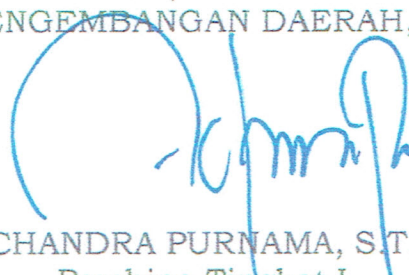
NO.	KODE	NAMA	KETERANGAN
1	CMI.11	Proses Bisnis Bappelitbangda	
2	CMI.11	Peta Proses Bisnis Bappelitbangda	Probis - Level 0
3	CMI.11.1	Peta Proses Bisnis Utama - Perencanaan Pembangunan Daerah	Probis - Level 1
4	CMI.11.1.1	Peta Proses Bisnis Penyusunan RPJPD	Probis - Level 2
5	CMI.11.1.1.1	Peta Proses Bisnis Persiapan Penyusunan RPJPD	Probis - Level 3
6	CMI.11.1.1.2	Peta Proses Bisnis Penyusunan Rancangan Awal RPJPD	Probis - Level 3
7	CMI.11.1.1.2.1	SOP Perumusan Rancangan Awal RPJPD	SOP - Level 4
8	CMI.11.1.1.2.2	SOP Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan RPJPD	SOP - Level 4
9	CMI.11.1.1.3	Peta Proses Bisnis Penyusunan Rancangan RPJPD	Probis - Level 3
10	CMI.11.1.1.3.1	SOP Perumusan Rancangan RPJPD	SOP - Level 4
11	CMI.11.1.1.3.2	SOP Pelaksanaan Musrenbang RPJPD	SOP - Level 4
12	CMI.11.1.1.4	Peta Proses Bisnis Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD	Probis - Level 3
13	CMI.11.1.1.4.1	SOP Perumusan Rancangan Akhir RPJPD	SOP - Level 4
14	CMI.11.1.1.5	Peta Proses Bisnis Penetapan RPJPD	Probis - Level 3
15	CMI.11.1.2	Peta Proses Bisnis Penyusunan RPJMD	Probis - Level 2
16	CMI.11.1.2.1	Peta Proses Bisnis Persiapan Penyusunan RPJMD	Probis - Level 3
17	CMI.11.1.2.1.1	SOP Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD	SOP - Level 4
18	CMI.11.1.2.2	Peta Proses Bisnis Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	Probis - Level 3
19	CMI.11.1.2.2.1	Peta Proses Bisnis Penyusunan SSK	Probis - Level 4
20	CMI.11.1.2.2.1.1	SOP Perumusan SSK	SOP - Level 5
21	CMI.11.2.1.2.1.2	SOP Reviu SSK	SOP - Level 4
22	CMI.11.1.2.2.2	Peta Proses Bisnis Penyusunan RAD SDG's	Probis - Level 4
23	CMI.11.1.2.2.2.1	SOP Perumusan RAD SDG's	SOP - Level 5
24	CMI.11.2.2.2.2.2	SOP Evaluasi Capaian SDG's	SOP - Level 4
25	CMI.11.1.2.2.3	Peta Proses Bisnis Penyusunan RAD SPM	Probis - Level 4
26	CMI.11.1.2.2.3.1	SOP Perumusan RAD SPM	SOP - Level 5
27	CMI.11.1.2.2.3.2	SOP Monitoring dan Evaluasi SPM	SOP - Level 5
28	CMI.11.1.2.2.4	SOP Perumusan Rancangan Awal RPJMD	SOP - Level 4
29	CMI.11.1.2.2.5	SOP Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	SOP - Level 4
30	CMI.11.1.2.2.6	SOP Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan RPJMD	SOP - Level 4
31	CMI.11.1.2.2.7	SOP Verifikasi Rancangan Renstra	SOP - Level 4
32	CMI.11.1.2.3	Peta Proses Bisnis Penyusunan Rancangan RPJMD	Probis - Level 3
33	CMI.11.1.2.3.1	SOP Perumusan Rancangan RPJMD	SOP - Level 4
34	CMI.11.1.2.3.2	SOP Pelaksanaan Musrenbang RPJMD	SOP - Level 4

35	CMI.11.1.2.4	Peta Proses Bisnis Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD	Probis - Level 3
36	CMI.11.1.2.4.1	SOP Perumusan Rancangan Akhir RPJMD	SOP - Level 4
37	CMI.11.1.2.5	Peta Proses Bisnis Penetapan RPJMD	Probis - Level 3
38	CMI.11.1.2.5.1	SOP Verifikasi Rancangan Akhir Renstra	SOP - Level 4
39	CMI.11.1.3	Peta Proses Bisnis Penyusunan RKPD	Probis - Level 2
40	CMI.11.1.3.1	Peta Proses Bisnis Persiapan Penyusunan RKPD	Probis - Level 3
41	CMI.11.1.3.2	Peta Proses Bisnis Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Probis - Level 3
42	CMI.11.1.3.2.1	SOP Perumusan Rancangan Awal RKPD	SOP - Level 4
43	CMI.11.1.3.2.2	SOP Penyusunan Renja Penanggulangan Kemiskinan Daerah	SOP - Level 4
44	CMI.11.1.3.3	Peta Proses Bisnis Penyusunan Rancangan RKPD	Probis - Level 3
45	CMI.11.1.3.3.1	SOP Perumusan Rancangan RKPD	SOP - Level 4
46	CMI.11.1.3.3.2	SOP Verifikasi Rancangan Awal Renja	SOP - Level 4
47	CMI.11.1.3.4	Peta Proses Bisnis Pelaksanaan Musrenbang	Probis - Level 3
48	CMI.11.1.3.4.1	SOP Pelatihan Kader Perencana	SOP - Level 4
49	CMI.11.1.3.4.2	SOP FGD Perencanaan Pembangunan Daerah	SOP - Level 4
50	CMI.11.1.3.4.3	SOP Pelaksanaan Musrenbang Kota	SOP - Level 4
51	CMI.11.1.3.5	Peta Proses Bisnis Penyusunan Rancangan Akhir RKPD	Probis - Level 3
52	CMI.11.1.3.5.1	SOP Perumusan Rancangan Akhir RKPD	SOP - Level 4
53	CMI.11.1.3.5.2	SOP Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan RKPD	SOP - Level 4
54	CMI.11.1.3.6	Peta Proses Bisnis Penetapan RKPD	Probis - Level 3
55	CMI.11.1.3.6.1	SOP Verifikasi Rancangan Akhir Renja	SOP - Level 4
56	CMI.11.2	Peta Proses Bisnis Utama - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Probis - Level 1
57	CMI.11.2.1	Peta Proses Bisnis Evaluasi dan Pelaporan RKPD	Probis - Level 2
58	CMI.11.2.1.1	Peta Proses Bisnis Evaluasi terhadap RKPD Triwulan I s.d. IV	Probis - Level 3
59	CMI.11.2.1.1.1	SOP Evaluasi Capaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah	SOP - Level 4
60	CMI.11.2.1.1.2	SOP Evaluasi terhadap Hasil Renja	SOP - Level 4
61	CMI.11.2.1.1.3	SOP Evaluasi terhadap Hasil RKPD	SOP - Level 4
62	CMI.11.2.2	Peta Proses Bisnis Evaluasi dan Pelaporan RPJMD	Probis - Level 2
63	CMI.11.2.2.1	Peta Proses Bisnis Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Tahun I s.d. V	Probis - Level 3
64	CMI.11.2.2.1.1	SOP Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah	SOP - Level 4
65	CMI.11.2.2.1.2	SOP Evaluasi terhadap Hasil RPJMD	SOP - Level 4
66	CMI.11.2.3	Peta Proses Bisnis Evaluasi dan Pelaporan RPJPD	Probis - Level 2
67	CMI.11.2.3.1	Peta Proses Bisnis Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Periode I s.d. IV	Probis - Level 3
68	CMI.11.2.3.1.1	SOP Evaluasi terhadap Hasil RPJPD	SOP - Level 4
69	CMI.11.3	Peta Proses Bisnis Utama - Penelitian dan Pengembangan	Probis - Level 1
70	CMI.11.3.1	Peta Proses Bisnis Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan	Probis - Level 2
71	CMI.11.3.1.1	SOP Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	SOP - Level 3
72	CMI.11.3.1.2	SOP Koordinasi Kelitbangan	SOP - Level 3
73	CMI.11.3.1.3	SOP Pembahasan Kelitbangan	SOP - Level 3

74	CMI.11.3.2	Peta Proses Bisnis Publikasi Hasil Kelitbangan	Probis - Level 2
75	CMI.11.3.2.1	SOP Sosialisasi / Diseminasi Hasil kelitbangan	SOP - Level 3
76	CMI.11.3.3	Peta Proses Bisnis Pengkajian dan Penerapan Hasil Kelitbangan	Probis - Level 2
77	CMI.11.3.3.1	SOP Uji Coba Kaji Terap (Prototype)	SOP - Level 3
78	CMI.11.3.4	Peta Proses Bisnis Monitoring dan Evaluasi Kelitbangan	Probis - Level 2
79	CMI.11.3.4.1	SOP Pengumpulan Data Hasil Kelitbangan	SOP - Level 3
80	CMI.11.3.4.2	SOP Pelaksanaan Kompetisi Inovasi Dan Teknologi	SOP - Level 3
81	CMI.11.3.4.3	SOP Fasilitasi Perlindungan HAKi	SOP - Level 3
82	CMI.11.4	Peta Proses Bisnis Manajerial - Pengelolaan Kinerja	Probis - Level 1
83	CMI.11.4.1	SOP Penyusunan Rencana Strategis	SOP - Level 2
84	CMI.11.4.2	SOP Penyusunan Rencana Kerja	SOP - Level 2
85	CMI.11.4.3	SOP Penyusunan Rencana Aksi Kinerja	SOP - Level 2
86	CMI.11.4.4	SOP Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Bappelitbangda Kota Cimahi	SOP - Level 2
87	CMI.11.4.5	SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	SOP - Level 2
88	CMI.11.5	Peta Proses Bisnis Manajerial - Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Probis - Level 1
89	CMI.11.5.1	SOP Pengumpulan Data Kinerja	SOP - Level 2
90	CMI.11.5.2	SOP Penyusunan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan	SOP - Level 2
91	CMI.11.5.3	SOP Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja	SOP - Level 2
92	CMI.11.5.4	SOP Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis	SOP - Level 2
93	CMI.11.5.5	SOP Monitoring dan Evaluasi Renaksi	SOP - Level 2
94	CMI.11.5.6	SOP Penyusunan Laporan Kinerja	SOP - Level 2
95	CMI.11.5.7	SOP Pengumpulan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	SOP - Level 2
96	CMI.11.6	Peta Proses Bisnis Pendukung Lainnya - Pengelolaan Keuangan	Probis - Level 1
97	CMI.11.6.1	SOP Pengajuan Pencairan Anggaran LS Barang dan Jasa	SOP - Level 2
98	CMI.11.6.2	SOP Pengajuan Pencairan Anggaran LS Gaji dan Tunjangan	SOP - Level 2
99	CMI.11.6.3	SOP Pengajuan Pencairan Anggaran Ganti Uang	SOP - Level 2
100	CMI.11.6.4	SOP Pengajuan Pencairan Anggaran NP2D	SOP - Level 2
101	CMI.11.6.5	SOP Pertanggungjawaban Belanja	SOP - Level 2
102	CMI.11.6.6	SOP Penyusunan Laporan Keuangan	SOP - Level 2
103	CMI.11.7	Peta Proses Bisnis Pendukung Lainnya - Pengelolaan Umum dan Kepegawaian	Probis - Level 1
104	CMI.11.7.1	SOP Pengelolaan Surat Masuk	SOP - Level 2
105	CMI.11.7.2	SOP Pengelolaan Surat Keluar	SOP - Level 2
106	CMI.11.7.3	SOP Pengelolaan Arsip	SOP - Level 2
107	CMI.11.7.4	SOP Pengelolaan Absensi Pegawai	SOP - Level 2
108	CMI.11.7.5	SOP Peremajaan Data Kepegawaian	SOP - Level 2
109	CMI.11.7.6	SOP Penyusunan Peta Kompetensi	SOP - Level 2
110	CMI.11.7.7	SOP Penyiapan SKUMPTK	SOP - Level 2
111	CMI.11.7.8	SOP Pengajuan Karpeg/Karis/Karsu	SOP - Level 2
112	CMI.11.7.9	SOP Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala	SOP - Level 2
113	CMI.11.7.10	SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat	SOP - Level 2
114	CMI.11.7.11	SOP Pengajuan Pensiun	SOP - Level 2

115	CMI.11.7.12	SOP Pengajuan Penghargaan ASN	SOP - Level 2
116	CMI.11.7.13	SOP Pemantauan Kinerja Aparatur	SOP - Level 2
117	CMI.11.7.14	SOP Penilaian Prestasi Kerja (<i>Reward And Punishment</i>)	SOP - Level 2
118	CMI.11.7.15	SOP Pengelolaan Perjalanan Dinas	SOP - Level 2
119	CMI.11.7.16	SOP Pengadaan Barang dan Jasa melalui Pengadaan Langsung	SOP - Level 2
120	CMI.11.7.17	SOP Pengajuan Pemeliharaan BMD	SOP - Level 2
121	CMI.11.7.18	SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas	SOP - Level 2
122	CMI.11.8	Peta Proses Bisnis Pendukung Lainnya - Sistem Informasi	Probis - Level 1
123	CMI.11.8.1	SOP Penggunaan Sistem Informasi Rencana Jangka Menengah (SIPD-RPJMD)	SOP - Level 2
124	CMI.11.8.2	SOP Penggunaan Sistem Informasi Verifikasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (SIPD-Renstra)	SOP - Level 2
125	CMI.11.8.3	SOP Penggunaan Sistem Informasi Verifikasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (SIPD-Renja)	SOP - Level 2
126	CMI.11.8.4	SOP Penggunaan Sistem Informasi Verifikasi Usulan Masyarakat/Reses/Hibah	SOP - Level 2
127	CMI.11.8.5	SOP Penggunaan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi	SOP - Level 2
128	CMI.11.8.6	SOP Penggunaan Sistem Informasi Data Pembangunan	SOP - Level 2

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,



ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19730413 199803 1 006



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA CIMAH**

Nomor Dokumen	CMI. 11.5.1
Tgl. Pembuatan	: 21 Juli 2022
No. / Tgl. Revisi	: 22 November 2022
Tgl. Efektif	: 22 November 2022
Disahkan oleh	KEPALA BAPPELITBANGDA  ADET CHANDRA FURNAMA, S.T.,M.M. NIP. 19730413 199803 006
Nama SOP	: Pengumpulan Data Kinerja

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi tahun 2017-2022;
11. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi;
13. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
14. Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer/ laptop.
2. Memahami sasaran dan capaian program
3. Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas Bappeda
4. Memiliki pemahaman Peraturan Perundang-undangan.
4. Memiliki pemahaman Peraturan Perundang-undangan.

KETERKAITAN

1. SOP Penyusunan Rencana Strategis
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja
3. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
4. SOP Penyusunan Laporan Kinerja

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer PC/Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. dokumen Rencana Kerja dan Dan Dokumen Rencana Strategis

PERINGATAN

Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak tidak tertib administrasi dan percepatan penanganan permasalahan tidak optimal

PENDATAAN DAN PENCATATAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

NO.	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Analisis Perencanaan	Kasubag Program dan Pelaporan	PPTK	Sekretaris/Kepala Bidang/Tim Evaluasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk membuat format pengumpulan data								
2	Membuat dan menyampaikan format pengumpulan data					Dokumen draft format pengumpulan data dan alat kerja	30 menit	Dokumen format pengumpulan data pelaksanaan kegiatan	
3	Menyampaikan format pengumpulan data kepada PPTK					Dokumen format pengumpulan data pelaksanaan kegiatan	30 menit	Dokumen data pelaksanaan kegiatan dan realisasi fisik dan keuangan versi e-reporting	
4	Mengisi dan menyampaikan isian format pengumpulan data serta realisasi fisik dan keuangan kepada masing-masing Kabid dan Sekretaris					Dokumen data pelaksanaan kegiatan dan realisasi fisik dan keuangan versi e-reporting	5 jam	Dokumen isian format pengumpulan data dan printout realisasi fisik dan keuangan versi e-reporting	
5	Menghimpun data dan informasi kinerja dari masing-masing Kepala Bidang dan Sekretaris					Dokumen format monev renaksi, laporan kegiatan, laporan realisasi fisik dan keuangan e-reporting	60 menit	Dokumen isian format bahan monev rencana aksi triwulan	
6	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan monev rencana aksi					Dokumen isian format, SPJ fungsional, laporan e-reporting	5 jam	Rekap hasil capaian kinerja kegiatan dan draft monev rencana aksi triwulan	
7	Menyampaikan draft monev rencana aksi untuk diverifikasi					Rekap hasil capaian kinerja kegiatan dan draft monev rencana aksi triwulan	15 menit	Dokumen draft monev	



PEMERINTAH DAERAH KOTA CIMAHI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Rd. Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang Gedung B Lantai III Telepon : (022) 6642865
Fax (022) 6642865 Website: www.cimahikota.go.id, e-mail: bappeda@cimahikota.go.id
Cimahi 40513 Jawa Barat

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 800 /Kep.372/BAPPELITBANGDA/2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan Peta Proses Bisnis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2006 Nomor 58 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
15. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
16. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
17. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi;
18. Keputusan Wali Kota Cimahi Nomor 060/Kep.2521- Org/2020 tentang Peta Proses Bisnis Pemerintah Daerah Kota Cimahi;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Nomor 065/Kep.363/Bappelitbangda tentang Peta Proses Bisnis

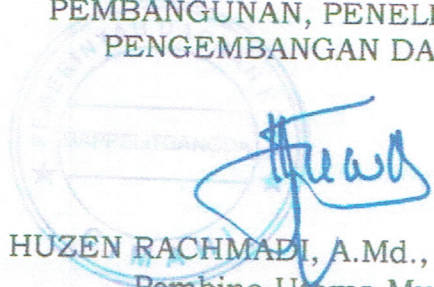
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi;

M E M U T U S K A N:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAH;
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi dengan daftar, uraian dan alur aktivitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi;
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dapat direviu secara berkala;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi,
pada tanggal, 21 Juli 2022

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,



Dr. HUZEN RACHMADI, A.Md., St, SE., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630416 198603 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
 DAERAH KOTA CIMAHI
 NOMOR : 800 / Kep. 372 / Bappelitbangda / 2022
 TENTANG : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BADAN
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA CIMAHI

DAFTAR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

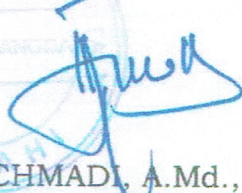
NO.	KODE	NAMA	KETERANGAN
1	CMI.11	Proses Bisnis Bappelitbangda	
2	CMI.11	Peta Proses Bisnis Bappelitbangda	Probis - Level 0
3	CMI.11.1	Peta Proses Bisnis Utama - Perencanaan Pembangunan Daerah	Probis - Level 1
4	CMI.11.1.1	Peta Proses Bisnis Penyusunan RPJPD	Probis - Level 2
5	CMI.11.1.1.1	Peta Proses Bisnis Persiapan Penyusunan RPJPD	Probis - Level 3
6	CMI.11.1.1.2	Peta Proses Bisnis Penyusunan Rancangan Awal RPJPD	Probis - Level 3
7	CMI.11.1.1.2.1	SOP Perumusan Rancangan Awal RPJPD	SOP - Level 4
8	CMI.11.1.1.2.2	SOP Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan RPJPD	SOP - Level 4
9	CMI.11.1.1.3	Peta Proses Bisnis Penyusunan Rancangan RPJPD	Probis - Level 3
10	CMI.11.1.1.3.1	SOP Perumusan Rancangan RPJPD	SOP - Level 4
11	CMI.11.1.1.3.2	SOP Pelaksanaan Musrenbang RPJPD	SOP - Level 4
12	CMI.11.1.1.4	Peta Proses Bisnis Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD	Probis - Level 3
13	CMI.11.1.1.4.1	SOP Perumusan Rancangan Akhir RPJPD	SOP - Level 4
14	CMI.11.1.1.5	Peta Proses Bisnis Penetapan RPJPD	Probis - Level 3
15	CMI.11.1.2	Peta Proses Bisnis Penyusunan RPJMD	Probis - Level 2
16	CMI.11.1.2.1	Peta Proses Bisnis Persiapan Penyusunan RPJMD	Probis - Level 3
17	CMI.11.1.2.1.1	SOP Penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD	SOP - Level 4
18	CMI.11.1.2.2	Peta Proses Bisnis Penyusunan Rancangan Awal RPJMD	Probis - Level 3
19	CMI.11.1.2.2.1	Peta Proses Bisnis Penyusunan SSK	Probis - Level 4
20	CMI.11.1.2.2.1.1	SOP Perumusan SSK	SOP - Level 5
21	CMI.11.1.2.2.1.2	SOP Review SSK	SOP - Level 4
22	CMI.11.1.2.2.2	Peta Proses Bisnis Penyusunan RAD SDGs	Probis - Level 4
23	CMI.11.1.2.2.2.1	SOP Perumusan RAD SDGs	SOP - Level 5
24	CMI.11.1.2.2.2.2	SOP Evaluasi Capaian SDGs	SOP - Level 4
25	CMI.11.1.2.2.3	Peta Proses Bisnis Pengumpulan Data dan Kebutuhan SPM	Probis - Level 4
26	CMI.11.1.2.2.3.1	SOP Perumusan RAD SPM	SOP - Level 5
27	CMI.11.1.2.2.3.2	SOP Monitoring dan Evaluasi SPM	SOP - Level 5
28	CMI.11.1.2.2.4	SOP Perumusan Rancangan Awal RPJMD	SOP - Level 4
29	CMI.11.1.2.2.5	SOP Penyusunan Data dan Informasi Pembangunan Daerah	SOP - Level 4
30	CMI.11.1.2.2.6	SOP Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan RPJMD	SOP - Level 4
31	CMI.11.1.2.2.7	SOP Verifikasi Rancangan Awal Renstra	SOP - Level 4
32	CMI.11.1.2.3	Peta Proses Bisnis Penyusunan Rancangan RPJMD	Probis - Level 3
33	CMI.11.1.2.3.1	SOP Perumusan Rancangan RPJMD	SOP - Level 4
34	CMI.11.1.2.3.2	SOP Pelaksanaan Musrenbang RPJMD	SOP - Level 4

35	CMI.11.1.2.4	Peta Proses Bisnis Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD	Probis - Level 3
36	CMI.11.1.2.4.1	SOP Perumusan Rancangan Akhir RPJMD	SOP - Level 4
37	CMI.11.1.2.4.2	SOP Verifikasi Rancangan Akhir Renstra	SOP - Level 4
38	CMI.11.1.2.5	Peta Proses Bisnis Penetapan RPJMD	Probis - Level 3
39	CMI.11.1.3	Peta Proses Bisnis Penyusunan RKPD	Probis - Level 2
40	CMI.11.1.3.1	Peta Proses Bisnis Persiapan Penyusunan RKPD	Probis - Level 3
41	CMI.11.1.3.2	Peta Proses Bisnis Penyusunan Rancangan Awal RKPD	Probis - Level 3
42	CMI.11.1.3.2.1	SOP Perumusan Rancangan Awal RKPD	SOP - Level 4
43	CMI.11.1.3.2.2	SOP Penyusunan Renja Penanggulangan Kemiskinan Daerah	SOP - Level 4
44	CMI.11.1.3.2.3	SOP Verifikasi Rancangan Awal Renja	SOP - Level 4
45	CMI.11.1.3.3	Peta Proses Bisnis Penyusunan Rancangan RKPD	Probis - Level 3
46	CMI.11.1.3.3.1	SOP Perumusan Rancangan RKPD	SOP - Level 4
47	CMI.11.1.3.4	Peta Proses Bisnis Pelaksanaan Musrenbang	Probis - Level 3
48	CMI.11.1.3.4.1	SOP Pelatihan Kader Perencana	SOP - Level 4
49	CMI.11.1.3.4.2	SOP Pelaksanaan Musrenbang (Rembug) RW	SOP - Level 4
50	CMI.11.1.3.4.3	SOP Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan	SOP - Level 4
51	CMI.11.1.3.4.4	SOP Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	SOP - Level 4
52	CMI.11.1.3.4.5	SOP FGD Perencanaan Pembangunan Daerah	SOP - Level 4
53	CMI.11.1.3.4.6	SOP Pelaksanaan Musrenbang RKPD	SOP - Level 4
54	CMI.11.1.3.5	Peta Proses Bisnis Penyusunan Rancangan Akhir RKPD	Probis - Level 3
55	CMI.11.1.3.5.1	SOP Perumusan Rancangan Akhir RKPD	SOP - Level 4
56	CMI.11.1.3.5.2	SOP Pengendalian dan Evaluasi Perumusan Kebijakan RKPD	SOP - Level 4
57	CMI.11.1.3.5.3	SOP Verifikasi Rancangan Akhir Renja	SOP - Level 4
58	CMI.11.1.3.6	Peta Proses Bisnis Penetapan RKPD	Probis - Level 3
59	CMI.11.2	Peta Proses Bisnis Utama - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Probis - Level 1
60	CMI.11.2.1	Peta Proses Bisnis Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan RKPD Kota	Probis - Level 2
61	CMI.11.2.1.1	Peta Proses Bisnis Evaluasi terhadap RKPD Triwulan I s.d IV	Probis - Level 3
62	CMI.11.2.1.1.3	SOP Evaluasi Capaian Penanggulangan Kemiskinan Daerah	SOP - Level 4
63	CMI.11.2.1.1.4	SOP Evaluasi terhadap Hasil Renja	SOP - Level 4
64	CMI.11.2.1.1.5	SOP Evaluasi terhadap Hasil RKPD	SOP - Level 4
65	CMI.11.2.1.1	Peta Proses Bisnis Evaluasi terhadap Hasil RPJMD Tahun I s.d V	Probis - Level 3
66	CMI.11.2.1.1.1	SOP Evaluasi terhadap Hasil Renstra Perangkat Daerah	SOP - Level 4
67	CMI.11.2.1.1.2	SOP Evaluasi terhadap Hasil RPJMD	SOP - Level 4
68	CMI.11.2.1.1	Peta Proses Bisnis Evaluasi terhadap Hasil RPJPD Periode I s.d IV	Probis - Level 3
69	CMI.11.2.1.1.1	SOP Evaluasi terhadap Hasil RPJPD	SOP - Level 4
70	CMI.11.3	Peta Proses Bisnis Utama - Penelitian dan Pengembangan	Probis - Level 1
71	CMI.11.3.1	Peta Proses Bisnis Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan	Probis - Level 2
72	CMI.11.3.1.1	SOP Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	SOP - Level 3
73	CMI.11.3.1.2	SOP Koordinasi Kelitbangan	SOP - Level 3
74	CMI.11.3.1.3	SOP Pembahasan Kelitbangan	SOP - Level 3
75	CMI.11.3.2	Peta Proses Bisnis Publikasi Hasil Kelitbangan	Probis - Level 2
76	CMI.11.3.2.1	SOP Sosialisasi/Diseminasi Hasil kelitbangan	SOP - Level 3

77	CMI.11.3.3	Peta Proses Bisnis Pengkajian dan Penerapan Hasil Kelitbangan	Probis - Level 2
78	CMI.11.3.3.1	SOP Uji Coba Kaji Terap (Prototype)	SOP - Level 3
79	CMI.11.3.4	Peta Proses Bisnis Monitoring dan Evaluasi Kelitbangan	Probis - Level 2
80	CMI.11.3.4.1	SOP Pengumpulan Data Hasil Kelitbangan	SOP - Level 3
81	CMI.11.3.4.2	SOP Pelaksanaan Kompetisi Inovasi dan Teknologi	SOP - Level 3
82	CMI.11.3.4.3	SOP Fasilitasi Perlindungan HAKi	SOP - Level 3
83	CMI.11.4	Peta Proses Bisnis Manajerial - Pengelolaan Kinerja	Probis - Level 1
84	CMI.11.4.1	SOP Penyusunan Rencana Strategis	SOP - Level 2
85	CMI.11.4.2	SOP Penyusunan Rencana Kerja	SOP - Level 2
86	CMI.11.4.3	SOP Penyusunan Rencana Aksi Kinerja	SOP - Level 2
87	CMI.11.4.4	SOP Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Bappelitbangda Kota Cimahi	SOP - Level 2
88	CMI.11.4.5	SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	SOP - Level 2
89	CMI.11.5	Peta Proses Bisnis Manajerial - Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Probis - Level 1
90	CMI.11.5.1	SOP Pengumpulan Data Kinerja	SOP - Level 2
91	CMI.11.5.2	SOP Penyusunan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan	SOP - Level 2
92	CMI.11.5.3	SOP Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja	SOP - Level 2
93	CMI.11.5.4	SOP Monitoring dan Evaluasi Rencana Strategis	SOP - Level 2
94	CMI.11.5.5	SOP Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi	SOP - Level 2
95	CMI.11.5.6	SOP Penyusunan Laporan Kinerja	SOP - Level 2
96	CMI.11.5.7	SOP Pengumpulan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	SOP - Level 2
97	CMI.11.6	Peta Proses Bisnis Pendukung Lainnya - Pengelolaan Keuangan	Probis - Level 1
98	CMI.11.6.1	SOP Pengajuan Pencairan Anggaran LS Barang dan Jasa	SOP - Level 2
99	CMI.11.6.2	SOP Pengajuan Pencairan Anggaran LS Gaji dan Tunjangan	SOP - Level 2
100	CMI.11.6.3	SOP Pengajuan Pencairan Anggaran Ganti Uang	SOP - Level 2
101	CMI.11.6.4	SOP Pengajuan Pencairan Anggaran NP2D	SOP - Level 2
102	CMI.11.6.5	SOP Pertanggungjawaban Belanja	SOP - Level 2
103	CMI.11.6.6	SOP Penyusunan Laporan Keuangan	SOP - Level 2
104	CMI.11.7	Peta Proses Bisnis Pendukung Lainnya - Pengelolaan Umum dan Kepegawaian	Probis - Level 1
105	CMI.11.7.1	SOP Pengelolaan Surat Masuk	SOP - Level 2
106	CMI.11.7.2	SOP Pengelolaan Surat Keluar	SOP - Level 2
107	CMI.11.7.3	SOP Pengelolaan Arsip	SOP - Level 2
108	CMI.11.7.4	SOP Pengelolaan Absensi Pegawai	SOP - Level 2
109	CMI.11.7.5	SOP Peremajaan Data Kepegawaian	SOP - Level 2
110	CMI.11.7.6	SOP Penyusunan Peta Kompetensi	SOP - Level 2
111	CMI.11.7.7	SOP Penyusunan SKUMPTK	SOP - Level 2
112	CMI.11.7.8	SOP Pengajuan Karpeg/Karis/Karsu	SOP - Level 2
113	CMI.11.7.9	SOP Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala	SOP - Level 2
114	CMI.11.7.10	SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat	SOP - Level 2
115	CMI.11.7.11	SOP Pengajuan Pensiun	SOP - Level 2
116	CMI.11.7.12	SOP Pengajuan Penghargaan ASN	SOP - Level 2
117	CMI.11.7.13	SOP Pemantauan Kinerja Aparatur	SOP - Level 2
118	CMI.11.7.14	SOP Penilaian Prestasi Kerja (<i>Reward And Punishment</i>)	SOP - Level 2
119	CMI.11.7.15	SOP Pengelolaan Perjalanan Dinas	SOP - Level 2

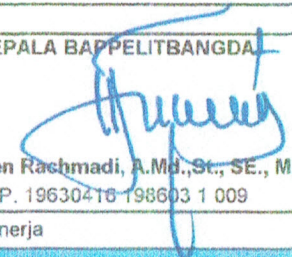
120	CMI.11.7.16	SOP Pengadaan Barang dan Jasa melalui Pengadaan Langsung	SOP - Level 2
121	CMI.11.7.17	SOP Pengajuan Pemeliharaan BMD	SOP - Level 2
122	CMI.11.7.18	SOP Pemeliharaan Kendaraan Dinas	SOP - Level 2
123	CMI.11.8	Peta Proses Bisnis Pendukung Lainnya - Sistem Informasi	Probis - Level 1
124	CMI.11.8.1	SOP Sistem informasi Rencana Jangka Menengah (SIPD-RPJMD)	SOP - Level 2
125	CMI.11.8.2	SOP Sistem informasi Rencana Strategis Perangkat Daerah (SIPD-Renstra)	SOP - Level 2
126	CMI.11.8.3	SOP Sistem informasi Rencana Kerja Perangkat Daerah (SIPD-Renja)	SOP - Level 2
127	CMI.11.8.4	SOP Sistem informasi Verifikasi Usulan Masyarakat	SOP - Level 2
128	CMI.11.8.5	SOP Sistem informasi Verifikasi Reses	SOP - Level 2
129	CMI.11.8.6	SOP Sistem informasi Verifikasi Hibah	SOP - Level 2
130	CMI.11.8.7	SOP Sistem informasi Monitoring dan Evaluasi	SOP - Level 2
131	CMI.11.8.8	SOP Sistem informasi Data Pembangunan	SOP - Level 2

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH,


Dr. HUZEN RACHMADI, A.Md., St, SE., M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 19630416 198603 1 009



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH
PEMERINTAH KOTA CIMAH**

Nomor Dokumen	CMI. 11.5.1
Tgl. Pembuatan	21 Juli 2022
No. / Tgl. Revisi	-
Tgl. Efektif	21 Juli 2022
Disahkan oleh	 KEPALA BAPPELITBANGDA DR. H. Huzen Rachmadi, A.Md.,St., SE., M.Kes. NIP. 19630418 198603 1 009
Nama SOP	: Pengumpulan Data Kinerja

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
10. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi tahun 2017-2022;
11. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
12. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Tugas dan Fungsi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cimahi;
13. Peraturan Wali Kota Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
14. Peraturan Wali Kota Nomor 62 Tahun 2021 Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas pada Perangkat Daerah Kota Cimahi.

KETERKAITAN

1. SOP Penyusunan Rencana Strategis
2. SOP Penyusunan Rencana Kerja
3. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan
4. SOP Penyusunan Laporan Kinerja

PERINGATAN

Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak tidak tertib administrasi dan percepatan penanganan permasalahan tidak optimal

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan Komputer/ laptop.
2. Memahami sasaran dan capaian program
3. Mengetahui tugas, pokok dan fungsi, uraian tugas Bappeda
4. Memiliki pemahaman Peraturan Perundang-undangan.
4. Memiliki pemahaman Peraturan Perundang-undangan.

PERALATAN / PERLENGKAPAN

1. Komputer PC/Laptop
2. Printer
3. Alat Tulis Kantor
4. dokumen Rencana Kerja dan Dan Dokumen Rencana Strategis

PENDATAAN DAN PENCATATAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		Analisis Perencanaan	Kasubbag Program dan Pelaporan	PPTK	Sekretaris/Kepala Bidang/Tim Evaluasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan untuk membuat format pengumpulan data								
2	Membuat dan menyampaikan format pengumpulan data					Dokumen draft format pengumpulan data dan alat kerja	30 menit	Dokumen format pengumpulan data pelaksanaan kegiatan	
3	Menyampaikan format pengumpulan data kepada PPTK					Dokumen format pengumpulan data pelaksanaan kegiatan	30 menit	Dokumen data pelaksanaan kegiatan dan realisasi fisik dan keuangan versi e-reporting	
4	Mengisi dan menyampaikan isian format pengumpulan data serta realisasi fisik dan keuangan kepada masing-masing Kabid dan Sekretaris					Dokumen data pelaksanaan kegiatan dan realisasi fisik dan keuangan versi e-reporting	5 jam	Dokumen isian format pengumpulan data dan printout realisasi fisik dan keuangan versi e-reporting	
5	Menghimpun data dan informasi kinerja dari masing-masing Kepala Bidang dan Sekretaris					Dokumen format monev renaksi, laporan kegiatan, laporan realisasi fisik dan keuangan e-reporting	60 menit	Dokumen isian format bahan monev rencana aksi triwulan	
6	Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul sebagai bahan penyusunan monev rencana aksi					Dokumen isian format, SPJ fungsional, laporan e-reporting	5 jam	Rekap hasil capaian kinerja kegiatan dan draft monev rencana aksi triwulan	
7	Menyampaikan draft monev rencana aksi untuk diverifikasi					Rekap hasil capaian kinerja kegiatan dan draft monev rencana aksi triwulan	15 menit	Dokumen draft monev	